

REKONSTRUKSI DAN REPOSISI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Achmad Asrori

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: ariefpplampung@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjelaskan keadaan nyata pendidikan Islam di Indonesia baik di Madrasah maupun di sekolah pada umumnya. Pendidikan Islam masih jauh dari harapan ideal kita. Pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan ajaran Islam tentang menghargai perbedaan dalam bingkai pluralisme multikulturalisme. Masih banyak dijumpai sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang masih mengajarkan *truth claim* atau klaim kebenaran yang sejatinya hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun. Kiranya peneliti merasa gelisah terhadap pendidikan Islam di Indonesia yang seperti itu apalagi sekarang sedang menghadapi berbagai tantangan globalisasi baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan hukum. Peneliti menggunakan studi pustaka dalam penelitiannya sehingga diperoleh wawasan tentang model pendidikan Islam yang cocok diterapkan di Indonesia dengan basis pendekatan pendidikan multikultural. Teori-teori yang digunakan adalah teori tentang pendidikan, pendidikan Islam, pluralisme, dan teori tentang multikulturalisme. Teori-teori tersebut digunakan untuk memberikan gambaran rekonstruksi dan reposisi pendidikan Islam di Indonesia berbasis pendekatan pendidikan Multikultural

Kata kunci: globalisasi, rekonstruksi, pendidikan, dan multikultural

Abstract

This writing investigates the real condition of Islamic education in Indonesia both in Islamic school, madrasah, and in general school. Islamic education is still far from what

it should be. Current practices of Islamic education in Indonesia has not yet reflected tolerance toward pluralism, and multiculturalism. Many schools and madrasa have been introducing 'truth claim' which it is against the spirit of any religion. This study was a literature study which focused on the multicultural-based Islamic education model appropriate for Indonesian context. Relevant theories on education, Islamic education, pluralism, and multiculturalism were used as the basis to reconstruct and reframe the position of the multicultural-based Islamic education in Indonesia.

Keywords: *globalization, reconstruction, education, and multiculturalism*

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang hampir dihadapi oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi. Pendidikan Islam mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Strategi yang digunakan tentunya berbasis pada pendidikan multikultural karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negeri yang plural dan multikultural. Keniscayaan itu diperoleh mulai dari bahasa, agama, budaya, etnis, suku, dan tradisi. Pluralitas merupakan realitas bagi masyarakat Indonesia.¹ Mempersoalkan dan menuding pluralitas sebagai masalah Adalah sikap yang kurang tepat. Pluralitas tidak bisa dihilangkan bahkan tidak bisa dituding sebagai pembuat masalah². Pluralitas atau keragaman tersebut pada satu pihak menjadi keuntungan dan kekayaan bagi negeri ini manakala dikelola dengan baik akan menghasilkan sinergistitas yang kokoh, tetapi di lain pihak akan menjadi ancaman besar yang menimbulkan malapetaka nasional yang muncul dalam wujud konflik sosial, politik, agama, dan budaya tatkala keragaman tidak terkelola

¹ Hamami Zada, "Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia" dalam sururin dan Maria Ulfa (ed), *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam* (Jakarta: Nuansa-Fatayat NU Ford Foundation, 2006), h.184

² Benyamin Molan, "Mengelola Konflik dan Resolusi Konflik", dalam Andre Ata Ujan, dkk, *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 97

dengan baik.³ Untuk mengelola keragaman negeri ini sebagai modal sosial (*Social Capital*) maka perlu upaya serius, misalnya melalui jalur pendidikan. Maka perlu adanya rekonstruksi dan reposisi pendidikan Islam di Indonesia berbasis pendekatan pendidikan multikultural atau pendidikan mengenai keragaman budaya

B. Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Menatap Tantangan Global Berwawasan Multikultural

1. Rekonstruksi Madrasah

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang oleh dan untuk masyarakat, sehingga mereka sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan.

Hingga saat ini 91,4% jumlah madrasah (MI, MTs, dan MA) yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri. Data ini mengandung makna betapa tingginya semangat kemandirian masyarakat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah, yang lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, sehingga mampu menampung sejumlah besar peserta didik dan sekaligus ikut mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Hanya saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya belum banyak didukung dengan profesionalitas dalam manajemen madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumberdaya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem pembelajaran, sumberdaya manusia, sumber dana maupun prasarana dan sarana yang memadai, sehingga sebagian besar proses dan hasil pendidikannya masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

³ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), h. ix

Bahkan semangat keagamaan dan dakwah tersebut akhir-akhir ini harus berhadapan dengan tuntutan baru terutama menyangkut Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti dengan beberapa Permendiknas sebagai penjabaran dan PP tersebut. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.⁴ Dengan demikian, setiap madrasah dituntut untuk memenuhi standar tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi.

Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah pada Dirjen Pendidikan Islam menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik yang bersifat internal maupun *eksternal*.⁵

Dari segi *internal*, tantangan yang dihadapi adalah menyangkut: (1) Mutu; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah umumnya belum dapat melahirkan lulusan yang berkualitas; (2) Pendidik; sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah belum berkualifikasi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan; (3) Kurikulum; sebagian besar madrasah belum dapat mengimplementasikan standar isi dan belum sepenuhnya dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal.

Persentase lulus Ujian Nasional cukup menggembirakan, kurang lebih 92%, tetapi perolehan nilai rata-rata masih rendah; (4) Manajemen; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah, yang 91,4 % swasta, umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional; (5) sarana prasarana; belum memadainya sarana dan

⁴ Baca : Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1)

⁵Dirjen Pendidik an Islam, "Kebijakan Departemen Agama RI dalam Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah". Makalah disampaikan pada rapat koordinasi pengembangan kurikulum madrasah, tanggal 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor.

prasarana pada sebagian besar madrasah; (6) status; belum sepenuhnya percaya diri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan terbatasnya peluang penerangan sehingga madrasah negeri, yang umumnya telah memenuhi standar minimal, hanya berjumlah 8,6%. Secara *Eksternal*, tantangan yang dihadapi madrasah adalah menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapatkan perhatian, termasuk dalam penyediaan anggaran, bahkan ada yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah.⁶

Rekonstruksi, perubahan dan inovasi itu sendiri hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh rekonstruksi itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga masing-masing madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak sekedarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, ataupun *stakeholders* lainnya.

Selain merekonstruksi madrasah melalui cara-cara di atas, kiranya perlu merekonstruksi madrasah dari kerangka kurikulumnya. Hendaknya kurikulum madrasah didesain untuk dapat lebih menanamkan rasa toleransi terhadap keragaman bahasa, budaya, agama di Indonesia. Kurikulum Madrasah harus penuh dengan muatan pendidikan saling menghormati antara pemeluk agama satu dengan yang lain atau toleransi agama.⁷ Keragaman sosial budaya, ekonomi, dan aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.⁸

⁶ Ibid

⁷ M. Zainudin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 15

⁸ S. Hamid Hasan, "Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", dalam Muhammad Tang, dkk, *Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan Implementasinya dalam pembelajaran PAI*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), h. 128

Madrasah harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu meleraikan konflik atas nama agama. Memang hal tersebut tidak mudah, tindakan preventif yang perlu dilakukan yaitu memberikan pemahaman agama kepada civitas akademika madrasah secara integral dan tidak setengah-setengah agar tidak menimbulkan *misunderstanding* terhadap agama orang lain.⁹

Madrasah yang mengajarkan pemahaman agama secara menyeluruh atau tidak setengah-setengah akan mengantarkan lulusannya memiliki wawasan yang luas, sikap toleran dan lapang dada sehingga tidak mudah tersinggung.¹⁰

2. Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Hingga saat ini pelaksanaan PAI yang berlangsung di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Berbagai macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing* dan belum banyak mengarah ke aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik menjalam hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui, padahal inti pendidikan agama berada di aspek ini; (2) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama; (3) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan atau bersifat statis a-kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga

⁹ M. Zainudin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*,...h,35

¹⁰ Faisal Ismail, “Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme” dalam Mundzirin Yusuf, dkk (Yogyakarta: POKJA Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.45

peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.¹¹

Memperhatikan tantangan PAI tersebut, agaknya hijrah yang diperlukan adalah lebih banyak menyangkut rekonstruksi aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual. Mungkin di benak kita muncul pertanyaan yang menggoda: apakah pembelajaran PAI dengan pendekatan kontekstual tidak akan mengakibatkan perubahan ajaran dan nilai-nilai dasar agama itu sendiri karena dihadapkan dengan tantangan zaman yang selalu berubah? Jika demikian, di mana letak prinsip-prinsip dasar keyakinan beragama? Menurut hemat penulis, prinsip dasar dan pokok ajaran agama secara ontologis dan aksiologis akan tetap seperti itu adanya, tetapi secara epistemologis akan bergerak sesuai dengan bentuk tantangan yang dihadapi. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI termasuk dalam wilayah epistemologis, yang titik tekannya terletak pada bagaimana proses, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan agama Islam, menghayati, dan mengamalkannya.

Menurut Dirx, Amey, and Haston bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bersumber dan pendekatan konstruktivis¹². Menurut teori belajar *constructivist*, bahwa individu belajar dengan cara mengkonstruksi makna melalui interaksi dengan dan menginterpretasi terhadap lingkungannya¹³. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa: *"The meaning of what individuals learn is coupled with their life experience and context; it is constructed by the learners, not*

¹¹ Muhaimin, *Nuansa*, h.13-124.

¹² Dirx, J. M.; and Haston, L., *"Context in the Xontextualized Curriculum: Adult life world as unitary or Multoplistic ?"* In *Proceeding of the 18th Annual Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community Education*, edited by A. Austin, G.E. Nynes, and R.T. Miller, (St. Louis : university of Missouri at St. Louis, 1999), h.79-84.

¹³ Brown, B, L., *Applying Constructivism in Covational and Career Education*. Information Series No. 378. Colombus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Covational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 1998.

by the teacher; and learning is anchored in the context of real-life situations and problems".¹⁴ Adapun karakteristik dan pembelajaran kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford & Wilson adalah sebagai berikut : (1) *emphasizes problem solving*; (2) *recognizes that teaching and learning need to occur in multiple contexts*; (3) *assists students in learning how to monitor their learning so that they can become self-regulated learners*, (4) *anchors teaching in the diverse life context of student?*, (5) *encourages students to learn from each other*; (6) *employs authentic assessment*.¹⁵

Untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran pendidikan agama diperlukan beberapa modal dasar, antara lain: pertama, perlunya pendekatan filsafat. Fazlur Rahman menyatakan:

*Philosophy is, however, a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other disciplines, since it inculcates a much needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences not least for religion and theology. Therefore, people that deprives it self of philosophy necessarily expose it self to starvation in term of fresh ideas-in fact it commits intellectual suicide"*¹⁶

Satu hal yang patut digaris bawahi dan pernyataan Fazlur Rahman tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan dan mengabaikan filsafat dalam memahami teks-teks agama, maka ia akan kehilangan ide-ide segar yang aktual dan kontekstual. Karena itu, pendekatan filsafat sangat diperlukan bagi orang yang ingin mengembangkan pemahaman teks-teks agama secara kontekstual. Kedua, perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan. Setidak-tidaknya pola pikir keagamaan dalam hal hubungan antara makna dengan lafaz atau bentuk teks ada 3 aliran: (1) monisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Clifford, M., and Wilson, M., " Contextual Teaching, Professional Learning, and Student Experiences : Lessons Learned From Implementation." Educational Brief No. 2 (Madison : Center on Education and Work, University of Wisconsin-Madison, december 2000), h.17.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*. (Chihago & London: The University of Chicago Press, 1982), h.157- 158.

teks merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, tidak ada kemungkinan perbedaan pendapat dalam memahami teks, karena merupakan sesuatu yang manunggal; (2) dualisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks dapat dipisahkan, dalam arti masing-masing punya eksistensi tersendiri, meskipun ada hubungan tetapi hubungan tersebut tidaklah begitu kompleks; (3) pluralisme, bahwa hubungan antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Sebuah teks merupakan konstruk metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal dan tekstual yang kompleks. Jadi, bukan hanya masing-masing makna dan bentuk teks mempunyai eksistensi tersendiri, tetapi hubungan antara keduanya bersifat amat kompleks.¹⁷ Pluralisme atau kemajemukan merupakan tantangan bagi semua agama karena pendekatan eksklusifnya agama-agama tersebut selama ratusan tahun terakhir.¹⁸

C. Rekontruksi dan Reposisi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Global Berbasis Pendekatan Pendidikan Multikultural

Formulasi kebijakan pendidikan agama dalam suatu negara akan mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam skala luas. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut akan memiliki kaitan dengan bidang-bidang lain dengan cakupan yang beragam. Implikasi dari kebijakan pendidikan agama tidak hanya berkaitan dengan bidang agama semata tetapi juga mempengaruhi bidang sosial, politik, budaya, bahkan juga bidang ekonomi.¹⁹

Adanya Undang-undang dan peraturan yang menggarisbawahi perlunya kita berhijrah, dalam arti mengubah pemahaman dan kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam yang semula seolah-

¹⁷ Burhan Nurgiantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), p.282. Dalam kaitannya dengan Islamic Studies, baca Muhammad Arkoun, *Al-Fikr Al-Islami Naqd wa Ijtihad*. Terjemahan dan Komentas Hashim Salih. (London : Al-Saqi, 1990), h..201 - 206.

¹⁸ John Hick, "A Philosophy of Religious Pluralism", dalam Paul Badham (ed), *A John Bick Reader*, (London: Macmillan, 1990), h.161-177

¹⁹ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), h.161

olah terpojokkan, bersifat eksklusif dan hanya menjadi tugas guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai *core* pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menjadi tugas guru agama saja, tetapi merupakan tugas bersama antara kepala sekolah, guru agama, guru umum, seluruh aparat sekolah, dan orang tua murid. Bahkan pendidikan Islam ini perlu dan harus dikembangkan menjadi budaya sekolah sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut di atas.

Hanya saja jika kita berbicara tentang pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari umat Islam sebagai *actor* dan pengembangnya. Selama ini memang ada bermacam-macam persepsi negatif terhadap pendidikan Islam bahkan sementara pihak berusaha memojokkannya. Ia dipersepsi sebagai *eksklusif* dan berusaha memperjuangkan berdirinya negara Islam serta menegakkan syari'at Islam di Indonesia, dan sebagainya. Persepsi semacam ini didukung oleh kenyataan bahwa akhir-akhir ini konflik-konflik dalam hubungan manusia sebagai individu ataupun kelompok bahkan bangsa berlangsung dalam eskalasi yang tinggi hingga ke tingkat *violence*, dan kasus-kasus kekerasan tersebut sering memakai legitimasi agama (Islam).

Apabila konflik-konflik tersebut yang menggunakan legitimasi agama serta pemaksaan keyakinan semakin membesar dan terus menerus maka akan menimbulkan banyak korban jiwa dan diiringi keinginan berbagai daerah seperti Aceh, Maluku, Papua, dan daerah lain yang ingin merdeka, maka yang kita takutkan ke depannya Indonesia hampir menjadi negara bagian yang kecil-kecil disebabkan keinginan pada sebuah kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan sebuah kehendak.²⁰

Kenyataan tersebut mengandung makna bahwa masih banyak hal yang perlu dipikirkan kembali dalam soal keberagamaan umat. Apakah beragama ini harus melihat orang lain yang tidak sehaluan sebagai musuh, sebagai *the others*? Apakah semua titik perbedaan itu harus dlsikapi secara tak ramah, harus diperangi, dan harus dilawan? Jika sikap-sikap dan perilaku semacam ini yang menonjol dalam

²⁰ Y. Sari Jatmiko dan A. Feri T. Indarto, *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar, 2006), h.14

pengembangan pendidikan Islam di sekolah ataupun di masyarakat, maka wajarlah jika pendidikan Islam terpojokkan dan didudukkan dalam posisi marginal. Kenapa seseorang tidak berusaha membangun sikap positif yang mengakui bahwa orang lain yang tidak sehalal, tidak sesekte, tidak seagama, adalah umat Tuhan yang sama-sama berhak hidup di bumi Tuhan ini meski berbeda.

Rasulullah mengajarkan prinsip integrasi sosial untuk membangun sebuah masyarakat madani. Islam menjadikan rujukan nilai, pengetahuan dan tindakan bagi para penganutnya untuk berta'aruf, saling mengenal, memahami atau tukar-menukar 'urf dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang berbeda latar belakang agama, sosial dan budaya. Prinsip ini perlu ditransformasikan kembali ke dalam kerangka pengembangan pendidikan untuk menghadapi masyarakat yang sedang dilanda konflik. Pendidikan agama memang berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran ataupun intoleran, serta berpotensi untuk mewujudkan integrasi ataupun disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini akan banyak ditentukan setidaknya-tidaknya oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; dan (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya.²¹

Jika pandangan teologi agama dan ajaran yang dipegangi bersifat ekstrim, dibarengi dengan model pemahaman dan penghayatan agama yang simbolik, tekstual dan skriptural, karena penjelasan-penjelasan dan arahan dan para guru agama yang bersifat doktriner, *rigid* (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta, serta didukung oleh lingkungan sosio-kultural yang eksklusif, maka bisa jadi akan melahirkan sikap intoleran dan agama dapat berperan sebagai faktor disintegratif (pemecah). Seperti yang sedang terjadi di Indonesia, kelompok Islam radikal walaupun minoritas, justru mendominasi pemberitaan media massa. Apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dengan tindakan kekerasan dan anarkisnya, atau aksi-aksi kelompok *jihadis* dengan bom-bomnya yang menakutkan masyarakat,

²¹ Muhaimin, *Nuansa*, h.141

jelas, telah mencoreng wajah Islam yang damai dan *rahmatan lil'alam*²².

Dalam menghadapi tantangan global, maka pengembangan pendidikan Islam di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Proses pengembangan pendidikan agama Islam juga hendaknya berbasis kearifan lokal yang berwawasan pluralisme dan multikulturalisme.²³ Karena itu, pengembangan pendidikan Islam diharapkan agar tidak sampai: (1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional²⁴. Pengembangan pendidikan Islam-dengan demikian-diharapkan agar mampu menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekadar persaudaraan antar umat Islam sebagaimana yang selama ini dipahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antar sesama. Menurut Islam, semua agama harus dilindungi, dan para pemeluknya harus diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Hanya saja konsep kebebasan beragama ini lebih mencerminkan pandangan hidup, perilaku dan mentalitas "*having a religion*". Karena itu, perlu dikembangkan dialog antarumat beragama yang lebih mencerminkan sikap, perilaku dan mentalitas "*being religious*".

Posisi pendidikan Islam yang sudah jelas tersebut perlu dikembangkan ke arah: (1) pendidikan Islam multikulturalis, yakni pendidikan Islam perlu dikemas dalam watak multikultural, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama; Pendidikan multikultural merupakan keniscayaan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam karena apabila kita teliti di sekolah maka akan kita dapati keragaman yang sangat banyak dan berfariasi baik pada anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, stakeholders, maupun lingkungan sekolah sekitar. Kondisi demikian perlu mendapat

²² Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), h.7

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, h.142.

pelayanan dan pengakuan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Akibatnya pelayanan secara adil, humanis, demokratis, dan toleransi perlu dikembangkan di lingkungan sekolah. Kelompok mayoritas tidak selayaknya memandang lebih superior dari yang lain yang berujung tidak adanya dialog.²⁵ (2) mempertegas misi *liutammima makarimal akhlaq*; dan (3) spiritualisasi watak kebangsaan, termasuk spiritualisasi berbagai aturan hidup untuk membangun bangsa yang beradab²⁶.

Untuk mewujudkan upaya semacam itu diperlukan beberapa modal dasar, yaitu: pertama, berusaha meningkatkan, memperkuat serta memperluas pengetahuan dan wawasan keislamannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pengetahuan dan wawasan keislaman seseorang akan diikuti dengan semakin tingginya sikap toleransinya. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan dan wawasan keislaman seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif terutama kalau ada yang mengembus-embus dan luar. Kedua, keluasan pengetahuan dan wawasan tersebut akan berimplikasi pada timbulnya sikap *husnuzhan* (berprasangka baik) terhadap sesama. Jika sejak semula seseorang memiliki prasangka buruk, maka segala apa yang dilakukan oleh pihak lain akan ditafsirkan jelek, sehingga menimbulkan keretakan dan konflik. Dan ketiga, yang paling penting lagi adalah tidak ada satu kelompok pun yang boleh mengklaim atau memonopoli kebenaran, sebagaimana tidak ada sekelompok pun yang memonopoli kesalahan. Hal tersebut untuk menghindari sikap eksklusivisme dalam agama, dimana seorang eksklusivis akan terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap bahwa orang lain keliru atau tidak selamat.²⁷ Bagi kristen, keselamatan hanya ada dalam gereja atau tidak ada nabi di luar gereja sementara

²⁵ Zakiyudin Baidhawi, (ed), *Reinvoensi Islam Multikultural* (Surakarta: PSB PS UMS, 2005), h.178

²⁶ A. Malik Fadjar, "Strategi Pengembangan Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi". Makalah disampaikan sebagai *Keynote Adress* dalam seminar *on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium*, The HUM Alumni Chaptes of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.

²⁷ Multi Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h.67-68.

bagi Islam, sikap tersebut tercantum dalam QS Al Maidah ayat 3 serta QS Ali Imran ayat 85 dan 19.²⁸ Padahal kita tahu bahwa setiap klaim pemutlakan yang dikumandangkan oleh masing-masing kelompok agama dapat menjerumuskan hubungan antar umat beragama dalam kemelut perseteruan yang tidak ada ujung pangkalnya.²⁹

Proses rekonstruksi pendidikan Islam kadang juga menemui masalah ketika sekolah pada saat ini juga ditengarai hanya merefleksikan dan menggemakan stereotip dan prasangka antar kelompok yang sudah terbentuk dan beredar di masyarakat, tidak berusaha menetralisasi dan menghilangkannya. Bahkan, ada indikasi bahwa sekolah ikut mengembangkan prasangka dan mengescalasi ketegangan antar kelompok melalui perundang-undangan, pendidikan agama, kurikulum, dan lainnya sehingga ikut memperuncing prasangka.³⁰

Pendidikan agama di sekolah kurang mampu menumbuhkan kesadaran positif realitas plural kehidupan kehidupan agama masyarakat kita, baik secara internal yang kaitannya dengan agama itu sendiri maupun secara eksternal kaitannya dengan agama lain. Maka pendidikan agama itu tak jarang masih diajarkan sebagai bagian dari upaya seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran. Padahal Tuhan dan kebenaran tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau kelompok orang.³¹ Seharusnya pendidikan agama itu merupakan pendidikan yang menghargai pluralitas dan multikultural akan memberi pengakuan akan pluralitas, sarana belajar untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog.³²

²⁸ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44-48

²⁹ Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Beragama*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h.137

³⁰ Khisbiyah, Yayah, dkk, *Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme dalam Membangun Masa Depan Anak-anak Kita*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 156-157

³¹ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h.215

³² Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.74

Pendidikan Islam di sekolah yang sejatinya haruslah menanamkan pengertian bahwa agama-agama yang ada di dunia ini masing-masing memiliki persamaan.³³ Persamaan atau titik temu (*Kalimatun sawa'*) antara agama-agama tersebut berada pada level esoterisme.³⁴ Maka membangun pondasi kukuh bagi dialog memberi dan menerima satu sama lain yang didasarkan pada menghargai perbedaan agama itu sesuatu yang sangat penting.³⁵

D. Simpulan

Lahirnya madrasah (sebagai institusi pendidikan Islam) yang semula lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, serta dikelola seadanya, saat ini menghadapi tuntutan baru baik menyangkut kontribusinya dalam merespon berbagai tantangan global, maupun menyangkut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka menghadapi tantangan global, maka pimpinan madrasah perlu berhijrah, dalam arti melakukan rekonstruksi terutama dan aspek manajerialnya yang lebih profesional dan mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, mampu memberikan quality assurance (jaminan mutu), layanan yang prima, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholders, yang hal ini merupakan realisasi dan ajaran ihsan.

Dalam konteks pelaksanaan PAI di sekolah, hijrah yang diperlukan adalah menyangkut rekonstruksi aspek metodologi pembelajaran, dan yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual. Untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual tersebut memerlukan beberapa modal dasar, antara lain: pendekatan filsafat dalam memahami teks-teks agama, agar tidak kehilangan ide-

³³ Zebiri, *Muslim and Christians, Face to Face*, (Oxford: Oneworld Kate, 1997), h.37

³⁴ Schuon, Fritjhof, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h.ix-x

³⁵ Alwi Sihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h.346

ide segar yang aktual dan kontekstual; serta perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan.

Posisi pendidikan Islam sebenarnya sudah jelas, tetapi dalam praktiknya di lapangan kadangkala mengalami proses reduksi pemahaman dan penerapan, sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang eksklusif dan pendidikan Islam diposisikan marginal. Dalam rangka menghadapi tantangan global, kita perlu berhijrah, dalam arti mengubah pemahaman dan kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam yang semula seolah-olah terpojokkan, bersifat eksklusif dan hanya menjadi tugas guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai *core* pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam berwawasan pluralisme- mutikulturalisme bukan hanya menjadi tugas guru agama saja tetapi merupakan tugas bersama, bahkan perlu dikembangkan menjadi budaya sekolah. Masih panjang jalan yang harus ditempuh oleh pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global berbasis pendidikan multikultural [.]

REFERENSI

- Achmad, 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Beragama*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
- Ali, Multi. 1998. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan)
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: Lkis)
- Baidhawi, Zakiyudin (ed), 2005. *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: PSB PS UMS)
- Brown, B, L., *Applying Constructivism in Covational and Career Education*. Information Series No. 378. Colombus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Covational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 1998.
- Burhanuddin. 1993. *The Leadership Roles of a Principal in Improving School Effectiveness*. Thesis, (South Australia: School Education, The Flinders University)

- Clifford, M., and Wilson, M., " Contextual Teaching, Professional Learning, and Student Experiences : Lessons Learned From Implementation." Educational Brief No. 2 (Madison : Center on Education and Work, University of Wisconsin-Madison, december 2000)
- Dirjen Pendidik an Islam, "Kebijakan Departemen Agama RI dalam Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah". Makalah disampaikan pada rapat koordinasi pengembangan kurikulum madrasah, tanggal 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor.
- Dirkx, J. M.; and Haston, L., 1999. "Context in the Xontextualized Curriculum : Adult life world as unitary or Multoplastic ? "In Proceeding of the 18th Annual Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community Education, edited by A. Austin, G.E. Nynes, and R.T. Miller, (St. Louis : university of Missouri at St. Louis)
- Dow, I.I., & Oakely, 1992. W.F. School Effectiveness and Leadership. *Alberta Journal of Educational Research*. 38, (1) : 33-45.
- Edmonds, R., 1979. "Some schools work and More Can", *Social Policy*, 9 (2)
- Hamid Hasan, S. 2009. "Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", dalam Muhammad Tang, dkk, *Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan Implementasinya dalam pembelajaran PAI*, (Yogyakarta: Idea Press)
- Hopkins, D., & Wideen, M. 1984. *Alternative Perspectives on School Improvement*, (London and Newa York : The Falmer Press)
- Ismail, Faisal. 2016. "Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme" dalam Mundzirin Yusuf, dkk (Yogyakarta: POKJA Akademik UIN Sunan Kalijaga)
- John Hick, 1990. "A Philosophy of Religious Pluralism", dalam Paul Badham (ed), *A John Bick Reader*, (London: Macmillan)
- Khisbiyah, Yayah, 2000. dkk, *Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme dalam Membangun Masa Depan Anak-anak Kita*, (Yogyakarta: Kanisius)

- Ki Supriyoko, "Pendidikan Masyarakat Multikultural", Kompas, 26 Januari 2004, h.4
- Lickona, Thomas, 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect And Resposibility*. (New York: Bantam Books)
- Maksum, Ali. 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing)
- Malik Fadjar, A. "Strategi Pengembangan Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi". Makalah disampaikan sebagai *Keynote Adress* dalam seminar *on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium*, The HUM Alumni Chaptes of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.
- Molan, Benyamin. 2009. "Mengelola Konflik dan Resolusi Konflik", dalam Andre Ata Ujan, dkk, *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama*, (Jakarta: PT Indeks)
- Muhaimin, 2008. *Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran (Upaya Reaktualisasi pendidikan Islam)*. (Malang: Lembaga Konsultasi dan Pengembangan pendidikan Islam (LKP2-1)
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo P, 2008. *Manajemen pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah*. (Jakarta: Prenada)
- Munawar Rachman, Budhy. 2001. *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina)
- Naim dan Achmad Sauqi, Ngainun. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media)
- Nizar, Samsul 2001. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Nurgiantoro, Burhan. 1995. *Teori Pengkajian Fiksi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), p.282. Dalam kaitannya dengan Islamic Studies, baca Muhammad Arkoun, *Al-Fikr Al-Islami Naqd wa Ijtihad*. Terjemahan dan Komentas Hashim Salih. (London : Al-Saqi, 1990)

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1)
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*. (Chihago & London: The University of Chicago Press)
- Schuon, Fritjhof, 1987. *Mencari Titik Temu Agama-agama*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Sergiovanni, T, J. 1987. *The Principalship : A Reflective Practice Perspective*, (Boston : Alyyn and Bacon, Inc)
- Sihab, Alwi. 2001. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1)
- Y. Sari Jatmiko dan A. Feri T. Indarto, 2006. *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar)
- Zada, Hamami. "Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia" dalam sururin dan Maria Ulfa (ed), *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam* (Jakarta: Nuansa-Fatayat NU Ford Foundation, 2006), h.184
- Zainudin, M. 2010. *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press)
- Zakiyuddin Baidhawyy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.74
- Zebiri, 1987. *Muslim and Christians, Face to Face*, (Oxford: Oneworld Kate)